

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bali Process telah berkembang menjadi mekanisme informal penting yang memperkuat langkah-langkah penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia di Asia Tenggara, khususnya dalam menciptakan sinergi antara Indonesia dan Thailand. Inisiasi kerja sama oleh Indonesia dan Australia lewat forum ini menghadirkan ruang multilateral di mana negara-negara dapat berbagi informasi, menyelaraskan kebijakan, mengadopsi praktik terbaik, dan menjalin pelatihan bersama. Melalui perangkat seperti Regional Cooperation Framework (RCF) dan Regional Support Office (RSO), Bali Process membentuk arah kebijakan bersama, menyediakan bantuan teknis, serta mendorong penyusunan standar identifikasi dan perlindungan korban, mendukung upaya penegakan hukum dan pemulangan korban antara Indonesia dan Thailand hingga ke tingkat akar rumput.

Walaupun tidak mengikat secara hukum, forum ini mampu membangun dorongan moral dan tekanan reputasi yang mendorong negara-negara anggotanya untuk mengambil langkah nyata dalam menerapkan rekomendasi atau kebijakan bersama. Peran serta aktif berbagai aktor regional dan organisasi internasional seperti IOM kian memperkuat jejaring kerja sama, sehingga Bali Process tetap relevan menghadapi modus baru kejahatan, misalnya keterlibatan Thailand sebagai pelopor inovasi program bersama Indonesia. Kehadiran RSO di Bangkok menjadi keunggulan tersendiri karena memperlancar koordinasi lapangan serta memfasilitasi penguatan kapasitas petugas nasional menghadapi tantangan baru TPPO berbasis teknologi.

Namun demikian, efektivitas forum ini masih dibatasi oleh masalah di level domestik seperti lemahnya koordinasi, prioritas kebijakan yang tak selalu sejalan, hingga celah korupsi dan keterlibatan aparat dalam jaringan sindikat. Akibatnya, fungsi utama Bali Process cenderung fokus di tataran normatif dan fasilitasi, dengan keterbatasan dalam pendorongan implementasi nyata di lapangan. Walau begitu, pengalaman forum ini menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi sesuai konteks kebutuhan regional lewat pelaksanaan dialog, pengembangan kebijakan regional berbasis konsensus, serta komitmen timbal balik antarnegara.

Singkatnya, Bali Process menjadi fondasi krusial bagi tata kelola respons kolektif terhadap ancaman perdagangan manusia di Asia Tenggara, menambal kekurangan skema kerja sama bilateral serta memperkaya inisiatif regional untuk perlindungan korban dan pemutusan rantai kejahatan lintas negara.

4.2 Saran Penelitian

Pemerintah Indonesia perlu bergegas memperbaiki pola koordinasi antarlembaga dalam negeri dengan membangun sistem lintas kementerian yang jelas pembagian tugasnya dan mengutamakan respons cepat melalui data tunggal. Juga, penting sekali dilakukan pelatihan rutin lintas profesi dan negara bagi petugas lapangan, agar setiap perkembangan baru tindak kejahatan perdagangan manusia, terutama yang melibatkan teknologi digital, bisa ditangani dengan pemahaman dan empati terhadap korban. Partisipasi aktif pada setiap forum dan kelompok diskusi di tingkat regional perlu diluaskan, bukan hanya sekadar hadir, namun juga mendorong terbentuknya SOP bersama sampai ke teknis perlindungan dan pemulangan para korban yang lebih manusiawi.

Di samping itu, kolaborasi dengan pihak luar pemerintah seperti LSM, organisasi internasional, komunitas korban, dan pelaku bisnis wajib diperluas, sehingga kebijakan yang lahir tidak hanya jadi milik negara, melainkan juga merefleksikan kebutuhan nyata masyarakat luas. Edukasi publik di daerah-daerah rawan pun harus makin digencarkan agar makin banyak warga yang paham celah-celah bahaya rekrutmen ilegal atau penipuan online, serta tahu ke mana harus meminta perlindungan. Sinergi kebijakan dengan forum-forum seperti ASEAN serta pembaruan hasil kerja Bali Process mesti terus didorong agar tak sekadar berhenti di atas kertas, melainkan terasa manfaat riilnya di akar rumput.

Akhirnya, tiap capaian dan kendala kebijakan harus dievaluasi secara berkala dengan cara terbuka, melibatkan pula pemantau independen bila perlu, supaya sistem penanganan perdagangan manusia ini terus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dengan memperkuat teknis kelembagaan, memperluas jaringan kerja sama, dan membuka pintu partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, Bali Process dapat menjadi motor utama dalam membangun ketahanan regional terhadap kejahatan perdagangan manusia serta memastikan keselamatan korban yang semakin terjamin dalam jangka panjang.